

THE CONSEQUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES REGULATION NO. 48/2017 CONCERNING BUSINESS SUPERVISION ON THE SECTOR OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES TOWARDS INVESTMENT CLIMATE OF UPSTREAM BUSINESS ACTIVITIES IN INDONESIA (CASE STUDY: PROVISIONS CONCERNING THE TRANSFER OF PARTICIPATING INTEREST)

GIOK KINSKI M D A * and M. Hawin **

ABSTRACT

On August 2017, the Indonesian Government enacted approval requirement for conducting the transfer of Participating Interest by virtue of Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 48 Year 2017 (“**MoEMR Regulation No. 48/2017**”). MoEMR Regulation No. 48/2017 is retroactive in nature, it shifts the mechanism of the transfer of Participating Interest from notification requirement into approval requirement. The signed PSC (Production Sharing Contract) has no choice but to comply with the regulation issued by the government. It shows that there are some aspects whereas the government as the contracting party and also as regulator can issue regulation that will erode the provisions in the PSC. The failure to enforce the provisions in PSC leads to legal uncertainty. Legal uncertainty will trigger deterioration in the investment climate on oil and gas industry. This legal research aims to analyze the consequence of the implementation of MoEMR Regulation No. 48/2017 towards investment climate on Upstream Business Activities in Indonesia.

This normative-empirical research relies dominantly on literature study added with field research to provide insights of the position of the Indonesian Government on the aim and purpose of enacting such mechanism (approval requirement for conducting the transfer of Participating Interest).

The finding of this research shows that in the context of retroactive regulation, the consequence of MoEMR Regulation No. 48/2017 towards investment climate on Upstream Business Activities in Indonesia is significant as it strongly related with the realization of the purpose of Article 33 of the Constitution. This is because in one hand it enables the government to control its natural resources to its fullest, but in the other hand

* Student at the Undergraduate Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada (S1 2015).

** Lecturer of Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada.

the implementation of retroactive regulation can cause deterioration in the investment climate. Retroactive regulation is a testament that shows inconsistency in regulation issued by the government. The impact of inconsistency in regulation will cause legal uncertainty for the investors. Legal uncertainty cause insufficient investment. As consequence, insufficient investment in oil and gas industry will cause decline of oil and gas production. Because oil and gas constitutes vital commodity for the nation, if such commodity is hampered then it will harm the interest of the livelihood of the people.

Keywords: Investment, Participating Interest, PSC, Oil and Gas Law, Retroactive Regulation

**KONSEKUENSI PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 48/2017 TENTANG
PENGAWASAN PENGUSAHAAN DI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL TERHADAP IKLIM INVESTASI KEGIATAN USAHA
HULU DI INDONESIA (STUDI KASUS: KETENTUAN MENGENAI
TRANSFER PARTICIPATING INTEREST)**

GIOK KINSKI M D A * dan M. Hawin **

INTISARI

Di bulan Agustus 2017, Pemerintah Indonesia menerbitkan persyaratan persetujuan untuk melakukan transfer *Participating Interest* berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 48 Tahun 2017 (“**Permen ESDM No. 48/2017**”). Permen ESDM No. 48/2017 bersifat retroaktif, peraturan tersebut merubah mekanisme transfer *Participating Interest* dari persyaratan pemberitahuan menjadi persyaratan persetujuan. PSC (*Production Sharing Contract*) yang sudah ditandatangani mau tidak mau harus tunduk terhadap peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat aspek dimana pemerintah sebagai pihak yang berkontrak sekaligus sebagai regulator dapat mengeluarkan peraturan yang dapat mengerosi perjanjian didalam PSC. Kegagalan untuk menegakkan perjanjian didalam PSC menyebabkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum akan memicu memburuknya iklim investasi di industri minyak dan gas. Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis konsekuensi dari implementasi Permen ESDM No. 48/2017 terhadap iklim investasi pada Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia.

Penelitian normatif-empiris ini pada pokoknya secara dominan mengandalkan studi pustaka, ditambah dengan penelitian lapangan untuk memberikan gambaran dari posisi Pemerintah Indonesia tentang maksud dan tujuan pemberlakuan peraturan tersebut (persyaratan persetujuan untuk melakukan transfer *Participating Interest*).

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks peraturan retroaktif, konsekuensi dari Permen ESDM No. 48/2017 terhadap iklim investasi pada Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia adalah signifikan karena

*Mahasiswi Program Sarjana Fakultas Huku, Universitas Gadjah Mada (S1 2015).

**Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.

hal tersebut erat kaitannya dengan perwujudan dari pasal 33 UUD 1945. Hal ini dikarenakan, di satu sisi peraturan tersebut memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan sumber daya alamnya semaksimal mungkin, tetapi di sisi lain penerapan peraturan retroaktif dapat menyebabkan memburuknya iklim investasi. Peraturan retroaktif menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menerbitkan aturannya. Peraturan yang tidak konsisten akan menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para investor. Ketidakpastian hukum akan menyebabkan menurunnya investasi. Akibatnya, investasi yang tidak memadai di industri minyak dan gas akan menyebabkan penurunan produksi minyak dan gas. Karena minyak dan gas merupakan komoditas vital negara, jika komoditas tersebut terhambat, maka akan mengganggu kepentingan seluruh warga negara Indonesia.

Kata kunci: Investasi, *Participating Interest*, PSC, UU Minyak dan Gas, Peraturan Retroaktif